

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Provinsi Maluku Utara

2012-2016



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

2012-2016

<http://malukubps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2012- 2016**

ISSN : 2460-7487
Nomor Publikasi : 82550. 1703
Katalog BPS : 9302020.82

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 63 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dicetak Oleh: CV. Ardhani

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2012- 2016**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Misfaruddin

Editor : Achmad Sobari

Penulis : Mia Amalia

Pengolah data : Mia Amalia

<http://malut.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Juli 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Maluku Utara,



Misfaruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.5 Perubahan Inventori	17
2.6 Ekspor dan Impor	20
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016	23
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Maluku Utara Menurut Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	28
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	32
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	33
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	35
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	37
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	38
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	40
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	41

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012- 2016	43
4.1	PDRB (Nominal)	44
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	45
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	45
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	46
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	47
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	47
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	48
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	50
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	51
	PENUTUP	53
	LAMPIRAN	55
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	24
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	25
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	26
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	27
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	28
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	28
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	30
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	31
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016 ...	32
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	33
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	33
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	35
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	36
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	38
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	39
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	40
Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	44
Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2012-2016	45

Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2012-2016	46
Tabel 20.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	46
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2012-2016	47
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	48
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	48
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	50
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	51
Tabel 26.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016	26

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	56
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	56
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	57
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	57
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	58
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	58
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	59
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	59
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	60
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016.....	60

PENJELASAN SIMBOL

Simbol yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut :

- * : Angka sementara
- ** : Angka sangat sementara

<http://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://malu.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

- x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank

Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
1. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari

PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah

barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *menginflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non

residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://malut.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN

PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016

<http://malut.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Maluku Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 sampai dengan 2016, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Maluku Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11 546,0	12 748,8	13 957,1	15 533,0	16 981,2
2. Konsumsi LNPRT	216,5	247,1	287,7	320,9	346,8
3. Konsumsi Pemerintah	6 022,8	6 903,3	7 965,6	8 925,9	9 746,4
4. PMTB	5 134,2	5 573,4	6 210,6	7 206,4	8 144,3
5. Perubahan Inventori	797,3	374,1	-228,0	-371,0	255,9
6. Ekspor Luar Negeri	5 213,2	7 992,3	390,9	201,3	508,8
7. Impor Luar Negeri	171,8	93,5	186,6	886,0	2 958,0
8. Net Ekspor Antar Daerah	-9 417,8	-12 306,0	-4 355,3	-4 289,8	-3 860,1
Total PDRB	19 340,5	21 439,5	24 042,1	26 640,8	29 165,2

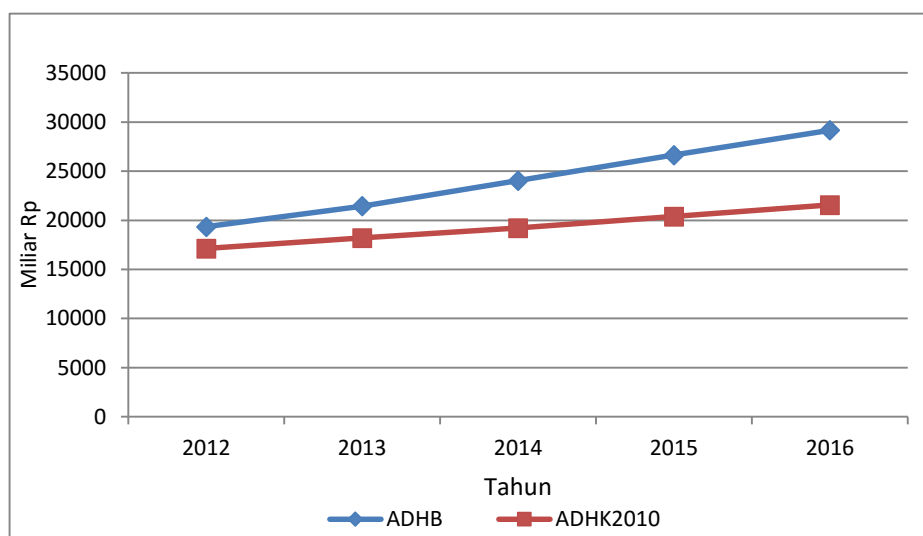
Nilai PDRB Provinsi Maluku Utara (adh Berlaku) selama periode tahun 2012 s.d. 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2012-2016**

<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10 613,7	11 079,9	11 510,3	11 966,8	12 606,8
2. Konsumsi LNPRT	196,4	216,2	239,6	249,1	261,9
3. Konsumsi Pemerintah	5 201,2	5 619,2	6 014,0	6 406,2	6 739,7
4. PMTB	4 659,1	5 026,5	5 251,2	5 759,0	6 251,6
5. Perubahan Inventori	688,7	-982,2	-183,7	-234,6	160,1
6. Ekspor Luar Negeri	6 119,8	8 415,1	311,0	145,0	457,1
7. Impor Luar Negeri	162,5	72,4	155,2	708,4	2 273,8
8. Net Ekspor Antar Daerah	-10 196,2	-11 093,4	-3 778,6	-3 202,2	-2 647,1
Total PDRB	17 120,1	18 208,7	19 208,8	20 381,0	21 556,3

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 – 2016



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,70	59,46	58,05	58,31	58,22
2. Konsumsi LNPRT	1,12	1,15	1,20	1,20	1,19
3. Konsumsi Pemerintah	31,14	32,20	33,13	33,50	33,42
4. PMTB	26,55	26,00	25,83	27,05	27,92
5. Perubahan Inventori	4,12	1,74	-0,95	-1,39	0,88
6. Ekspor Luar Negeri	26,96	37,28	1,63	0,76	1,74
7. Impor Luar Negeri	0,89	0,44	0,78	3,33	10,14
8. Net Ekspor Antar Daerah	-48,69	-57,40	-18,12	-16,10	-13,24
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2012-2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 30 - 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 25 s.d 27 persen. Pada tahun 2012-2014 perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih tinggi dari nilai impor negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”, namun mulai tahun 2015 menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014, adanya pelarangan ekspor luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Sementara itu, perdagangan dalam negeri Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan dengan komponen net ekspor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar daerah pada tahun 2012-2016. Kecenderungan perdagangan dalam negeri Provinsi Maluku Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara
Tahun 2012-2016**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,33	4,39	3,88	3,97	5,35
2. Konsumsi LNPRT	8,03	10,08	10,83	3,99	5,14
3. Konsumsi Pemerintah	8,68	8,04	7,03	6,52	5,21
4. PMTB	10,60	7,89	4,47	9,67	8,55
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	0,82	37,51	-96,30	-53,37	215,13
7. Impor Luar Negeri	-61,88	-55,44	114,30	356,42	220,96
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	6,98	6,36	5,49	6,10	5,77

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dari tahun 2012 s.d 2016 secara rata-rata mencapai 6,14 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,98 persen (2012); 6,36 persen (2013); 5,49 persen (2014); 6,10 persen (2015); dan 5,77 persen (2016).

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 6,98 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (5,49 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 - 2016**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	108,78	115,06	121,26	129,80	134,70
2. Konsumsi LNPRT	110,24	114,30	120,10	128,82	132,39
3. Konsumsi Pemerintah	115,80	122,85	132,45	139,33	144,61
4. PMTB	110,20	110,88	118,27	125,13	130,28
5. Perubahan Inventori	115,76	-38,08	124,12	158,13	159,85
6. Ekspor	85,19	94,98	125,67	138,77	111,31
7. Impor	105,68	129,08	120,20	125,07	130,09
8. Net Ekspor Antar Daerah	92,37	110,93	115,26	133,96	145,83
Total PDRB	112,97	117,74	125,16	130,71	135,30

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga	11 546,0	12 748,8	13 957,1	15 533,0	16 981,2
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	10 613,7	11 079,9	11 510,3	11 966,8	12 606,8
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	59,70	59,46	58,05	58,31	58,22
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	51 239,03	55 365,94	59 347,93	64 704,11	69 328,75
b. ADHK 2010	47 101,43	48 118,07	48 943,76	49 848,94	51 469,69

¹ Indeks perkembangan

Lanjutan Tabel 6.

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	10 582,27	11 434,99	12 257,45	13 363,50	14 319,09
b. ADHK 2010	9 727,74	9 938,06	10 108,62	10 295,43	10 630,49
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	5,33	4,39	3,88	3,97	5,35
b. Per-RT	3,03	2,16	1,72	1,85	3,25
c. Perkapita	3,03	2,16	1,72	1,85	3,25
Jumlah RT (<i>unit</i>)	225 337	230 265	235 175	240 062	244 937
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1 091,08	1 114,90	1 138,67	1 162,35	1 185,91

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 s.d. 2016 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 59,07 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 58,05 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2012, secara umum setiap rumah tangga di Provinsi Maluku Utara menghabiskan dana sekitar 51 239,03 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (*sandang*, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 55 365,94 ribu rupiah (2013); 59 347,93 ribu rupiah (2014); 64 704,11 ribu rupiah (2015); dan menjadi 69 328,75 ribu rupiah (2016).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

yaitu sebesar 3,25 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Maluku Utara meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,72 s.d 3,25 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,33 persen pada tahun 2012. Kemudian, menurun pada dua tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 4,39 persen (2013), dan 3,88 persen (2014), namun kembali meningkat pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 3,95 persen dan 5,35 persen. Sementara itu, konsumsi per-kapita menurun dari 3,03 persen di tahun 2012 menjadi sebesar 2,16 persen dan 1,72 persen di tahun 2013 dan 2014. Kemudian pada tahun berikutnya (2015 dan 2016) meningkat kembali menjadi 1,85 persen dan 3,25 persen.. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berkisar antara 2,03 s.d 2,24 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	55,23	53,88	52,00	51,94	52,38
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,69	4,80	5,03	5,08	5,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,15	8,69	9,06	9,11	9,17
d. Kesehatan & Pendidikan	7,10	7,09	7,38	7,41	7,41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,38	17,90	18,46	18,07	17,64
f. Hotel & Restoran	3,57	3,65	3,73	3,66	3,60
g. Lainnya	3,88	4,00	4,35	4,73	4,70
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2012 s.d. 2016, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Maluku Utara, bahwa konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga yang lainnya. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 s.d. 2015, namun meningkat kembali pada tahun 2016. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 55,23 persen (2012); 53,88 persen (2013); 52,00 persen (2014); 51,94 persen (2015); dan 52,38 persen (2016).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, minuman, dan rokok menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga mempunyai peranan yang relatif besar terhadap konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi sekitar 16,76 s.d 18,48 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,75	3,22	2,06	3,19	4,98
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	5,89	6,47	4,80	5,20
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,50	6,52	7,19	6,40	6,49
d. Kesehatan & Pendidikan	1,42	4,72	5,79	3,87	5,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,18	5,67	6,31	5,05	6,13
f. Hotel & Restoran	9,23	6,86	3,08	2,29	4,62
g. Lainnya	7,44	6,77	6,15	5,26	4,77
Total Konsumsi	5,33	4,39	3,88	3,97	5,35

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 4,75 persen (2012); 3,22 persen (2013); 2,06 persen (2014); 3,19 persen (2015); dan 4,98 persen (2016). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,75	4,35	3,52	7,74	5,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,96	6,67	7,80	7,38	4,29
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,19	10,61	6,49	5,10	3,39
d. Kesehatan & Pendidikan	5,03	5,21	7,72	7,56	3,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,72	7,60	6,19	3,73	0,54
f. Hotel & Restoran	7,59	5,63	8,32	6,95	2,72
g. Lainnya	7,14	6,48	12,33	14,80	3,71
Total Konsumsi	3,73	5,77	5,38	7,05	3,77

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 2,75 persen (2012); 4,35 persen (2013); 3,52 persen (2014); 7,74 persen (2015); dan 5,02 persen (2016). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 1,96 persen (2012) menjadi 6,67 persen (2013). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 7,80 persen (2014); 7,38 persen (2015); dan 4,29 persen (2016).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT	216,5	247,1	287,7	320,9	346,8
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	196,4	216,2	239,6	249,1	261,9
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,12	1,15	1,20	1,20	1,19

Pengeluaran untuk konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara sekitar 1,12 s.d 1,20 persen. Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu mencapai 1,12 persen (2012); 1,15 persen (2013); 1,20 persen (2014); 1,20 persen (2015); dan 1,19 persen (2016).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	6 022,8	6 903,3	7 965,6	8 925,9	9 746,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	5 201,2	5 619,2	6 014,0	6 406,2	6 739,7
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,14	32,20	33,13	33,50	33,42
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	5 520,04	6 191,89	6 995,56	7 679,25	8 218,48
b. ADHK 2010	4 767,04	5 040,08	5 281,65	5 511,46	5 683,15
Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah perkapita (%)	6,30	5,73	4,79	4,35	3,12
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1 091,08	1 114,90	1 138,67	1 162,35	1 185,91

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 6.022,8 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 9.746,4 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 31,14 persen di tahun 2012 hingga mencapai 33,50 persen pada tahun 2015. Namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 33,42 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2012 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 5.520,04 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang berkisar antara 3,12 persen s.d. 6,30 persen.

**Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁵					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	4 707,40	5 491,26	6 386,70	7 135,42	7 523,99
(%)	78,16	79,55	80,18	79,94	77,20
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	1 315,37	1 412,06	1 578,91	1 790,51	2 222,41
(%)	21,84	20,45	19,82	20,06	22,80
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	6 022,77	6 903,32	7 965,61	8 925,94	9 746,40
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	7,27	10,29	8,01	6,23	1,51
b. Konsumsi Individu	13,98	0,03	3,19	7,71	20,11
Total Konsumsi	8,68	8,04	7,03	6,52	5,21
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁶					
a. Konsumsi Kolektif	7,0	5,8	7,7	5,2	3,9
b. Konsumsi Individu	6,6	7,3	8,4	5,3	3,3
Total Konsumsi	6,9	6,1	7,8	5,2	3,8

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 79 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 12). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 proporsinya mencapai 78,16 persen meningkat menjadi 79,55 persen dan 80,18 persen di tahun 2013 dan 2014. Kemudian menurun kembali di tahun 2015 dan 2016 menjadi 79,94 dan 77,20 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2012-2016 juga berfluktuatif. Proporsi konsumsi individu yang terbesar berada pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,80 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁶ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB	5 134,2	5 573,4	6 210,6	7 206,4	8 144,3
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5 134,2	5 573,4	6 210,6	7 206,4	8 144,3
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4 659,1	5 026,5	5 251,2	5 759,0	6 251,6
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	26,55	26,00	25,83	27,05	27,92
Struktur PMTB⁸					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	2 095,6	2 383,2	2 866,8	3 017,9	3 321,8
(%)	61,08	54,26	55,84	54,15	53,49
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1 335,5	2 009,0	2 267,4	2 555,5	2 888,8
(%)	38,92	45,74	44,16	45,85	46,51
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	3 431,2	4 392,2	5 134,2	5 573,4	6 210,6
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan⁹ (%)					
a. Bangunan	6,45	6,78	5,65	7,50	6,84
b. Non Bangunan	15,56	9,10	3,20	12,06	10,36
Total PMTB	10,60	7,89	4,47	9,67	8,55

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2012 - 2014 menurun dari 10,60 persen menjadi 4,47 persen, dan meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 9,67 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhannya kembali mengalami penurunan sebesar 8,55 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun berfluktuasi tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

Proporsi bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2012 s.d 2016 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

pada tahun 2012 sebesar 61,08 persen. Keadaan ini mengalami penurunan menjadi 54,26 persen pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami peningkatan kembali di tahun 2014 yaitu sebesar 55,84 persen. Kemudian menurun lagi di tahun 2015 dan 2016 menjadi 54,15 persen dan 53,49 persen.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2012 s.d 2016 pertumbuhan bangunan cukup berfluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan bangunan mencapai 6,45 persen, kemudian di tahun 2013 meningkat sebesar 6,78 persen. Pertumbuhan bangunan kembali menurun sebesar 5,65 persen pada tahun 2014, kemudian terjadi peningkatan sebesar 7,50 persen pada tahun 2015, dan namun menurun kembali pada tahun 2016 sebesar 6,84 persen. Sedangkan Non Bangunan mengalami pertumbuhan cenderung menurun dari tahun 2012 s.d 2015, yaitu dari 15,56 persen tahun 2012 menurun pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 9,10 persen (2013); dan 3,20 persen (2014). Kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 12,06 persen, namun kembali terjadi penurunan sebesar 10,36 persen di tahun 2016.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2012-2014 pertumbuhan total PMTB mengalami penurunan terus menerus, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2015 namun menurun pada tahun 2016, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 10,60 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,47 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	797,3	374,1	-228,0	-371,0	255,9
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	688,7	-982,2	-183,7	-234,6	160,1
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,12	1,74	-0,95	-1,39	0,88

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2012 s.d 2013 perubahan inventori bertanda positif (terjadi penambahan persediaan barang) yaitu masing-masing sebesar 797,3 miliar rupiah (2012); dan 374,1 miliar rupiah (2013). Namun pada tahun 2014 dan 2015, perubahan inventori mempunyai tanda negatif yaitu minus 228,0 miliar rupiah dan minus 371 miliar rupiah. Pada tahun 2016 perubahan inventori kembali bertanda positif sebesar 255,9 miliar rupiah.

3.6 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012- 2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	5 213,2	7 992,3	390,9	201,3	508,8
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6 119,8	8 415,1	311,0	145,0	457,1
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	26,96	37,28	1,63	0,76	1,74
Struktur Ekspor ¹⁰					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	5 175,8	7 960,2	357,9	160,6	461,3
(%)	99,28	99,60	91,57	79,81	90,67
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	37,4	32,1	33,0	40,6	47,4
(%)	0,72	0,40	8,43	20,19	9,33
Total ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹					
- Barang	0,99	37,84	-96,59	-59,01	259,93
- Jasa	-22,30	-21,72	-7,38	11,51	25,92
Total ekspor	0,82	37,51	-96,30	-53,37	215,13

Secara total, nilai ekspor tahun 2016 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ekspor mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 7.992,3 miliar rupiah. Pada tahun 2014 dan 2015, nilai ekspor merosot cukup tajam yaitu sebesar 390,9 miliar rupiah dan 201,3 miliar rupiah. Namun di tahun 2016, nilai ekspor kembali meningkat sebesar 508,8 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dari tahun 2012 s.d 2013 dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 6.119,8 miliar rupiah (2012) dan 8.415,1 miliar rupiah (2013). Kemudian menurun pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 311,0 miliar rupiah dan 145,0 miliar rupiah. Proporsinya dalam PDRB juga memiliki pola yang sama dengan nilai nominal ekspor, yaitu dari 26,96 persen pada tahun 2012 menjadi 1,74 persen di tahun 2016.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Provinsi Maluku Utara berupa barang (rata-rata 92 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2013 dan 2016, masing-masing mencapai 37,51 persen dan 215,13 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2014 (minus 96,30 persen) dan tahun 2015 sebesar minus 53,37 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang pada tahun 2014 dan 2015 yang juga

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing minus 96,59 persen (tahun 2014) dan minus 59,01 persen (tahun 2015).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012- 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	171,8	93,5	186,6	886,0	2 958,0
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	162,5	72,4	155,2	708,4	2 273,8
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,89	0,44	0,78	3,33	10,14
Struktur Impor ¹²					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	137,1	52,7	141,6	831,6	2 895,9
(%)	79,82	56,32	75,89	93,86	97,90
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	34,7	40,8	45,0	54,4	62,2
(%)	20,18	43,68	24,11	6,14	2,10
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	-66,49	-69,92	214,55	445,79	231,60
- Jasa	-12,88	3,91	-4,59	7,01	8,75
Total impor	-61,88	-55,44	114,30	356,42	220,96

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor luar negeri Provinsi Maluku Utara pada periode tahun 2012 s.d 2016 mengalami fluktuasi (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Nilai impor tertinggi terjadi di tahun 2016 dan terendah di tahun 2013 dengan besaran masing-masing yaitu 2.958,0 miliar rupiah (2016) dan 93,5 miliar rupiah (2013).

Proporsi impor luar negeri pada tahun 2012 s.d 2016 memiliki rata-rata sebesar 3,11 persen. Dengan masing-masing proporsi impor luar negeri sebesar 0,89 persen (2012); 0,44 persen (2013), 0,78 persen (2014); 3,33 persen (2015); dan 10,14 persen (2016).

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014 s.d. 2016 sebesar 114,30 persen; 356,42 persen; dan 220,96 persen. Pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan impor mengalami kontraksi yaitu minus 61,88 persen dan 55,44 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan impor barang yang mana pada tahun 2012 dan 2013 juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 66,49 persen dan 69,92 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 445,79 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 80,76 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2012 - 2016, struktur impor luar negeri baik dalam bentuk barang maupun jasa mengalami fluktuasi.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross*

hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<http://malut.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2012-2016

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	19 340,5	21 439,5	24 042,1	26 640,8	29 165,2
- ADHK 2010	17 120,1	18 208,7	19 208,8	20 381,0	21 556,3
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	17 726,06	19 230,01	21 114,23	22 919,86	24 593,08
- ADHK 2010	15 691,01	16 332,22	16 869,52	17 534,41	18 177,00
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	4,64	4,09	3,29	4,11	4,03
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1 091,08	1 114,90	1 138,67	1 162,35	1 185,91
Pertumbuhan	2,24	2,18	2,13	2,08	2,03

PDRB per-kapita Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Maluku Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,13 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Provinsi Maluku Utara (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2012-2016

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	11 546,05	12 748,84	13 957,15	15 533,00	16 981,18
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 526,42	10 142,99	12 081,72	16 758,40	20 465,79
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,53	1,26	1,16	0,93	0,83

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,53 kali yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio yang relatif tajam pada tahun 2015 (0,93) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	11 546,05	12 748,84	13 957,15	15 533,00	16 981,18
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	5 134,2	5 573,4	6 210,6	7 206,4	8 144,3
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,25	2,29	2,25	2,16	2,09

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tahun 2013 s.d. 2016 cenderung menurun, dengan rasio masing-masing sebesar 2,29 persen (2013); 2,25 persen (2014); 2,16 persen (2015); dan 2,09 persen (2016). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami perlambatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	11 546,0	12 748,8	13 957,1	15 533,0	16 981,2
a. Rumah tangga					
b. LNPRT	216,5	247,1	287,7	320,9	346,8
c. Pemerintah	6 022,8	6 903,3	7 965,6	8 925,9	9 746,4
J u m l a h	17 785,3	19 899,2	22 210,5	24 779,9	27 074,3
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	19 340,5	21 439,5	24 042,1	26 640,8	29 165,2
Proporsi	91,96	92,82	92,38	93,01	92,83

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 90 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2012-2016

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 526,42	10 142,99	12 081,72	16 758,40	20 465,79
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	5 134,2	5 573,4	6 210,6	7 206,4	8 144,3
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,47	1,82	1,95	2,33	2,51

Pada tahun 2012 s.d 2016 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	19 340,5	21 439,5	24 042,1	26 640,8	29 165,2
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	11 902,7	14 550,2	16 232,8	21 732,9	26 775,1
Rasio PDRB terhadap Impor	1,62	1,47	1,48	1,23	1,09

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2012 s.d. 2016 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2012 (1,62), lebih disebabkan peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Penurunan rasio menunjukkan meningkatnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	19 340,5	21 439,5	24 042,1	26 640,8	29 165,2
%	61,90	59,57	59,70	55,07	52,14
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	11 902,7	14 550,2	16 232,8	21 732,9	26 775,1
%	38,10	40,43	40,30	44,93	47,86
<u>Total Permintaan Akhir</u> ¹⁴ (Miliar Rp)	31 243,2	35 989,7	40 274,8	48 373,7	55 940,4
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

¹⁴ Termasuk diskrepansi statistik

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, dengan rentang 38 s.d. 47 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 59 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 31.243,2 miliar rupiah (2012) menjadi sebesar 55.940,4 miliar rupiah (2016).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 19.340,5 miliar rupiah (2012); 21.439,5 miliar rupiah (2013); 24.042,1 miliar rupiah (2014); 26.640,8 miliar rupiah (2015); dan 29.165,2 miliar rupiah (2016). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 11.902,7 miliar rupiah (2012); 14.550,2 miliar rupiah (2013); 16.232,8 miliar rupiah (2014); 21.732,9 miliar rupiah (2015); dan 26.775,1 miliar rupiah (2016).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 526,4	10 143,0	12 081,7	16 758,4	20 465,8
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	11 902,7	14 550,2	16 232,8	21 732,9	26 775,1
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-4 376,3	-4 407,2	-4 151,1	-4 974,5	-6 309,4
Rasio ekspor terhadap Impor	0,63	0,70	0,74	0,77	0,76

Selama periode 2012 - 2016, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Provinsi Maluku Utara yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2016 tercatat masing-masing sebesar minus 4.376,3 miliar rupiah (2012), minus 4.407,2 miliar rupiah (2013), minus 4.151,1 miliar rupiah (2014), minus 4.974,5 miliar rupiah (2015), dan minus 6.309,4 miliar rupiah (2016).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,63 menjadi sekitar 0,70 pada tahun 2013; kemudian 0,74 pada tahun 2014; 0,77 pada tahun 2015 dan 0,76 pada tahun 2016.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara 0 dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara 0 dan positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional
Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	5 213,2	7 992,3	390,9	201,3	508,8
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	171,8	93,5	186,6	886,0	2 958,0
(X – M) (Miliar Rp)	5 041,5	7 898,8	204,3	-684,8	-2 449,2
(X +M) (Miliar Rp)	5 385,0	8 085,8	577,4	1 087,3	3 466,8
R P I	0,94	0,98	0,35	(0,63)	(0,71)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012-2014, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor, namun berubah arah pada tahun 2015 dan 2016. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus meningkat dari 5.213,2 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi 7.992,3 miliar rupiah pada tahun 2013, namun menurun menjadi 390,9 miliar rupiah pada tahun 2014, menurun menjadi 201,3 miliar rupiah pada tahun 2015, kemudian meningkat 508,8 miliar rupiah pada tahun 2016. Berbeda dengan kecenderungan impor, yang memiliki nilai yang berfluktuasi setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Maluku Utara pada periode 2012-2016 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio antara -0,71 s.d. 0,98.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	17 120,1	18 208,7	19 208,8	20 381,0	21 556,3
Perubahan (miliar rupiah)	1 117,6	1 088,7	1 000,0	1 172,3	1 175,3
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	4 659,1	5 026,5	5 251,2	5 759,0	6 251,6
ICOR	4,17	4,62	5,25	4,91	5,32

Data di atas menunjukkan besaran ICOR Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 4,17 (2012) menjadi 4,62 (2013); 5,25 (2014); 4,91 (2015); dan 5,32 (2016).

<http://malut.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 s.d. 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Maluku Utara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 s.d. 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Maluku Utara terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://malut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11 546 049,5	12 748 837,5	13 957 149,4	15 532 999,0	16 981 176,2
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6 376 361,8	6 868 546,7	7 257 146,4	8 068 150,6	8 895 573,3
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	541 264,7	611 388,5	701 727,6	789 700,3	866 395,9
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	940 696,0	1 108 391,6	1 265 138,6	1 414 707,0	1 557 527,5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	820 260,9	903 737,3	1 029 884,4	1 150 604,9	1 257 569,5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2 006 819,2	2 281 727,9	2 575 908,7	2 807 051,8	2 995 354,6
1.f. Hotel dan Restoran	412 557,7	465 651,9	519 946,7	568 794,8	611 215,8
1.g. Lainnya	448 089,1	509 393,5	607 397,0	733 989,6	797 539,5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	216 469,2	247 056,5	287 719,9	320 929,2	346 772,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6 022 774,6	6 903 319,1	7 965 612,1	8 925 936,9	9 746 399,9
3.a. Konsumsi Kolektif	4 707 404,4	5 491 257,0	6 386 700,6	7 135 424,3	7 523 991,5
3.b. Konsumsi Individu	1 315 370,3	1 412 062,1	1 578 911,5	1 790 512,6	2 222 408,4
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5 134 204,6	5 573 409,5	6 210 616,6	7 206 423,7	8 144 346,3
4.a. Bangunan	2 866 781,5	3 017 863,3	3 321 832,8	3 771 005,0	4 093 071,9
4.b. Non-Bangunan	2 267 423,1	2 555 546,2	2 888 783,7	3 435 418,7	4 051 274,4
5. Perubahan Inventori	797 255,6	374 073,1	-227 970,7	-370 990,2	255 883,6
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	5 213 249,1	7 992 282,0	390 863,4	201 282,6	508 767,8
6.a. Barang	5 175 824,4	7 960 221,2	357 903,2	160 636,1	461 322,5
6.b. Jasa	37 424,8	32 060,9	32 960,2	40 646,5	47 445,2
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	171 769,8	93 492,4	186 576,8	886 044,6	2 958 017,0
7.a. Barang	137 108,5	52 655,7	141 585,0	831 608,2	2 895 865,4
7.b. Jasa	34 661,3	40 836,7	44 991,8	54 436,4	62 151,6
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-9 417 769,1	-12 306 000,1	-4 355 337,1	-4 289 750,5	-3 860 101,3
8.a. Ekspor	2 313 174,9	2 150 703,7	11 690 855,6	16 557 117,9	19 957 020,2
8.b. Impor	11 730 944,0	14 456 703,8	16 046 192,7	20 846 868,4	23 817 121,5
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	19 340 463,8	21 439 485,2	24 042 076,7	26 640 785,9	29 165 227,9

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10 613 694,2	11 079 907,9	11 510 348,8	11 966 837,3	12 606 830,6
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5 937 186,8	6 128 618,0	6 255 134,1	6 454 421,1	6 775 881,4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	468 458,6	496 050,8	528 152,3	553 503,8	582 280,7
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	829 257,3	883 334,1	946 840,5	1 007 413,4	1 072 787,0
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	757 706,4	793 481,6	839 428,0	871 946,3	920 317,8
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1 851 435,8	1 956 373,5	2 079 870,4	2 184 995,1	2 318 942,0
1.f. Hotel dan Restoran	356 691,8	381 152,6	392 902,3	401 898,7	420 450,7
1.g. Lainnya	412 957,6	440 897,3	468 021,3	492 659,0	516 171,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	196 358,5	216 150,1	239 559,3	249 122,2	261 923,5
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5 201 193,6	5 619 168,6	6 014 045,6	6 406 213,1	6 739 717,6
3.a. Konsumsi Kolektif	4 056 761,7	4 474 358,6	4 832 705,5	5 133 800,4	5 211 385,9
3.b. Konsumsi Individu	1 144 431,9	1 144 809,9	1 181 340,1	1 272 412,7	1 528 331,7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4 659 083,8	5 026 494,3	5 251 233,5	5 759 035,1	6 251 559,9
4.a. Bangunan	2 438 554,4	2 603 929,5	2 751 132,3	2 957 526,6	3 159 901,8
4.b. Non-Bangunan	2 220 529,4	2 422 564,8	2 500 101,1	2 801 508,5	3 091 658,1
5. Perubahan Inventori	688 690,3	-982 247,6	-183 670,4	-234 609,6	160 080,4
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	6 119 829,2	8 415 141,8	311 034,4	145 043,6	457 082,6
6.a. Barang	6 085 491,7	8 388 260,7	286 136,6	117 279,4	422 122,6
6.b. Jasa	34 337,5	26 881,1	24 897,8	27 764,2	34 960,0
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	162 535,6	72 431,0	155 217,9	708 443,8	2 273 795,8
7.a. Barang	130 645,2	39 294,9	123 603,1	674 613,2	2 237 005,3
7.b. Jasa	31 890,4	33 136,1	31 614,8	33 830,6	36 790,6
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-10 196 244,3	-11 093 440,6	-3 778 572,4	-3 202 164,0	-2 647 076,9
8.a. Ekspor	2 383 954,8	2 641 747,5	12 178 772,4	17 170 688,7	19 241 200,7
8.b. Impor	12 580 199,2	13 735 188,1	15 957 344,8	20 372 852,8	21 888 277,6
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	17 120 069,8	18 208 743,2	19 208 760,9	20 381 033,9	21 556 321,8

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	59,70	59,46	58,05	58,31	58,22
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,97	32,04	30,19	30,28	30,50
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,80	2,85	2,92	2,96	2,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	4,86	5,17	5,26	5,31	5,34
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,24	4,22	4,28	4,32	4,31
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,38	10,64	10,71	10,54	10,27
1.f. Hotel dan Restoran	2,13	2,17	2,16	2,14	2,10
1.g. Lainnya	2,32	2,38	2,53	2,76	2,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,12	1,15	1,20	1,20	1,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	31,14	32,20	33,13	33,50	33,42
3.a. Konsumsi Kolektif	24,34	25,61	26,56	26,78	25,80
3.b. Konsumsi Individu	6,80	6,59	6,57	6,72	7,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	26,55	26,00	25,83	27,05	27,92
4.a. Bangunan	14,82	14,08	13,82	14,16	14,03
4.b. Non-Bangunan	11,72	11,92	12,02	12,90	13,89
5. Perubahan Inventori	4,12	1,74	(0,95)	(1,39)	0,88
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	26,96	37,28	1,63	0,76	1,74
6.a. Barang	26,76	37,13	1,49	0,60	1,58
6.b. Jasa	0,19	0,15	0,14	0,15	0,16
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,89	0,44	0,78	3,33	10,14
7.a. Barang	0,71	0,25	0,59	3,12	9,93
7.b. Jasa	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(48,69)	(57,40)	(18,12)	(16,10)	(13,24)
8.a. Ekspor	11,96	10,03	48,63	62,15	68,43
8.b. Impor	60,65	67,43	66,74	78,25	81,66
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	62,00	60,85	59,92	58,72	58,48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,68	33,66	32,56	31,67	31,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,74	2,72	2,75	2,72	2,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	4,84	4,85	4,93	4,94	4,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,43	4,36	4,37	4,28	4,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,81	10,74	10,83	10,72	10,76
1.f. Hotel dan Restoran	2,08	2,09	2,05	1,97	1,95
1.g. Lainnya	2,41	2,42	2,44	2,42	2,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15	1,19	1,25	1,22	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	30,38	30,86	31,31	31,43	31,27
3.a. Konsumsi Kolektif	23,70	24,57	25,16	25,19	24,18
3.b. Konsumsi Individu	6,68	6,29	6,15	6,24	7,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	27,21	27,60	27,34	28,26	29,00
4.a. Bangunan	14,24	14,30	14,32	14,51	14,66
4.b. Non-Bangunan	12,97	13,30	13,02	13,75	14,34
5. Perubahan Inventori	4,02	(5,39)	(0,96)	(1,15)	0,74
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	35,75	46,21	1,62	0,71	2,12
6.a. Barang	35,55	46,07	1,49	0,58	1,96
6.b. Jasa	0,20	0,15	0,13	0,14	0,16
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,95	0,40	0,81	3,48	10,55
7.a. Barang	0,76	0,22	0,64	3,31	10,38
7.b. Jasa	0,19	0,18	0,16	0,17	0,17
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(59,56)	(60,92)	(19,67)	(15,71)	(12,28)
8.a. Ekspor	13,92	14,51	63,40	84,25	89,26
8.b. Impor	73,48	75,43	83,07	99,96	101,54
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,64	10,42	9,48	11,29	9,32
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,77	7,72	5,66	11,18	10,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	19,84	12,96	14,78	12,54	9,71
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	13,03	17,83	14,14	11,82	10,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,49	10,18	13,96	11,72	9,30
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,14	13,70	12,89	8,97	6,71
1.f. Hotel dan Restoran	15,13	12,87	11,66	9,39	7,46
1.g. Lainnya	11,93	13,68	19,24	20,84	8,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,78	14,13	16,46	11,54	8,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	23,00	14,62	15,39	12,06	9,19
3.a. Konsumsi Kolektif	26,14	16,65	16,31	11,72	5,45
3.b. Konsumsi Individu	12,37	7,35	11,82	13,40	24,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	28,01	8,55	11,43	16,03	13,02
4.a. Bangunan	13,72	5,27	10,07	13,52	8,54
4.b. Non-Bangunan	50,42	12,71	13,04	18,92	17,93
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	97,69	53,31	(95,11)	(48,50)	152,76
6.a. Barang	98,54	53,80	(95,50)	(55,12)	187,18
6.b. Jasa	32,30	(14,33)	2,81	23,32	16,73
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	97,11	(45,57)	99,56	374,90	233,85
7.a. Barang	112,08	(61,60)	168,89	487,36	248,22
7.b. Jasa	9,82	17,82	10,17	20,99	14,17
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)					
8.a. Ekspor	6,29	(7,02)	443,58	41,62	20,53
8.b. Impor	36,50	23,24	10,99	29,92	14,25
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	13,98	10,85	12,14	10,81	9,48

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,55	4,39	3,88	3,97	5,35
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,11	3,22	2,06	3,19	4,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,75	5,89	6,47	4,80	5,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	4,81	6,52	7,19	6,40	6,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,28	4,72	5,79	3,87	5,55
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,37	5,67	6,31	5,05	6,13
1.f. Hotel dan Restoran	7,09	6,86	3,08	2,29	4,62
1.g. Lainnya	10,52	6,77	6,15	5,26	4,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,18	10,08	10,83	3,99	5,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	13,53	8,04	7,03	6,52	5,21
3.a. Konsumsi Kolektif	16,28	10,29	8,01	6,23	1,51
3.b. Konsumsi Individu	4,24	0,03	3,19	7,71	20,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	22,77	7,89	4,47	9,67	8,55
4.a. Bangunan	9,31	6,78	5,65	7,50	6,84
4.b. Non-Bangunan	43,88	9,10	3,20	12,06	10,36
5. Perubahan Inventori	(83,27)	(242,63)	(81,30)	27,73	(168,23)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	122,37	37,51	(96,30)	(53,37)	215,13
6.a. Barang	123,60	37,84	(96,59)	(59,01)	259,93
6.b. Jasa	26,99	(21,72)	(7,38)	11,51	25,92
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	87,97	(55,44)	114,30	356,42	220,96
7.a. Barang	101,29	(69,92)	214,55	445,79	231,60
7.b. Jasa	10,26	3,91	(4,59)	7,01	8,75
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	59,43	8,80	(65,94)	(15,25)	(17,33)
8.a. Ekspor	4,07	10,81	361,01	40,99	12,06
8.b. Impor	44,44	9,18	16,18	27,67	7,44
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,80	6,36	5,49	6,10	5,77

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	110,42	120,88	134,53	147,07
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	107,72	113,81	126,53	139,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	112,96	129,65	145,90	160,07
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	100,00	117,83	134,49	150,39	165,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	110,18	125,56	140,27	153,31
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	113,70	128,36	139,88	149,26
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	112,87	126,03	137,87	148,15
1.g. Lainnya	100,00	113,68	135,55	163,80	177,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	114,13	132,91	148,26	160,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	114,62	132,26	148,20	161,83
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	116,65	135,67	151,58	159,83
3.b. Konsumsi Individu	100,00	107,35	120,04	136,12	168,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	108,55	120,97	140,36	158,63
4.a. Bangunan	100,00	105,27	115,87	131,54	142,78
4.b. Non-Bangunan	100,00	112,71	127,40	151,51	178,67
5. Perubahan Inventori	100,00	46,92	(28,59)	(46,53)	32,10
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	153,31	7,50	3,86	9,76
6.a. Barang	100,00	153,80	6,91	3,10	8,91
6.b. Jasa	100,00	85,67	88,07	108,61	126,77
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	54,43	108,62	515,83	1 722,08
7.a. Barang	100,00	38,40	103,26	606,53	2 112,10
7.b. Jasa	100,00	117,82	129,80	157,05	179,31
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	130,67	46,25	45,55	40,99
8.a. Ekspor	100,00	92,98	505,40	715,77	862,75
8.b. Impor	100,00	123,24	136,79	177,71	203,03
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	110,85	124,31	137,75	150,80

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,39	108,45	112,75	118,78
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	103,22	105,36	108,71	114,13
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	105,89	112,74	118,15	124,30
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	100,00	106,52	114,18	121,48	129,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,72	110,79	115,08	121,46
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	105,67	112,34	118,02	125,25
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	106,86	110,15	112,67	117,88
1.g. Lainnya	100,00	106,77	113,33	119,30	124,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	110,08	122,00	126,87	133,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	108,04	115,63	123,17	129,58
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	110,29	119,13	126,55	128,46
3.b. Konsumsi Individu	100,00	100,03	103,23	111,18	133,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	107,89	112,71	123,61	134,18
4.a. Bangunan	100,00	106,78	112,82	121,28	129,58
4.b. Non-Bangunan	100,00	109,10	112,59	126,16	139,23
5. Perubahan Inventori	100,00	(142,63)	(26,67)	(34,07)	23,24
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	137,51	5,08	2,37	7,47
6.a. Barang	100,00	137,84	4,70	1,93	6,94
6.b. Jasa	100,00	78,28	72,51	80,86	101,81
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	44,56	95,50	435,87	1 398,95
7.a. Barang	100,00	30,08	94,61	516,37	1 712,27
7.b. Jasa	100,00	103,91	99,14	106,08	115,37
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	108,80	37,06	31,41	25,96
8.a. Ekspor	100,00	110,81	510,86	720,26	807,11
8.b. Impor	100,00	109,18	126,84	161,94	173,99
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,36	112,20	119,05	125,91

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	108,78	115,06	121,26	129,80	134,70
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107,40	112,07	116,02	125,00	131,28
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115,54	123,25	132,86	142,67	148,79
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	113,44	125,48	133,62	140,43	145,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	108,26	113,90	122,69	131,96	136,65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	108,39	116,63	123,85	128,47	129,17
1.f. Hotel dan Restoran	115,66	122,17	132,33	141,53	145,37
1.g. Lainnya	108,51	115,54	129,78	148,99	154,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	110,24	114,30	120,10	128,82	132,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	115,80	122,85	132,45	139,33	144,61
3.a. Konsumsi Kolektif	116,04	122,73	132,16	138,99	144,38
3.b. Konsumsi Individu	114,94	123,34	133,65	140,72	145,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	110,20	110,88	118,27	125,13	130,28
4.a. Bangunan	117,56	115,90	120,74	127,51	129,53
4.b. Non-Bangunan	102,11	105,49	115,55	122,63	131,04
5. Perubahan Inventori	115,76	(38,08)	124,12	158,13	159,85
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	85,19	94,98	125,67	138,77	111,31
6.a. Barang	85,05	94,90	125,08	136,97	109,29
6.b. Jasa	108,99	119,27	132,38	146,40	135,71
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	105,68	129,08	120,20	125,07	130,09
7.a. Barang	104,95	134,00	114,55	123,27	129,45
7.b. Jasa	108,69	123,24	142,31	160,91	168,93
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	92,37	110,93	115,26	133,96	145,83
8.a. Ekspor	97,03	81,41	95,99	96,43	103,72
8.b. Impor	93,25	105,25	100,56	102,33	108,81
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	112,97	117,74	125,16	130,71	135,30

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,87	5,77	5,38	7,05	3,77
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,52	4,35	3,52	7,74	5,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13,32	6,67	7,80	7,38	4,29
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	7,84	10,61	6,49	5,10	3,39
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,08	5,21	7,72	7,56	3,55
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,51	7,60	6,19	3,73	0,54
1.f. Hotel dan Restoran	7,50	5,63	8,32	6,95	2,72
1.g. Lainnya	1,27	6,48	12,33	14,80	3,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,29	3,68	5,08	7,26	2,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,34	6,09	7,81	5,20	3,79
3.a. Konsumsi Kolektif	8,48	5,76	7,68	5,17	3,88
3.b. Konsumsi Individu	7,80	7,32	8,36	5,29	3,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,27	0,62	6,66	5,80	4,11
4.a. Bangunan	4,03	(1,42)	4,18	5,60	1,59
4.b. Non-Bangunan	4,55	3,31	9,53	6,13	6,86
5. Perubahan Inventori	26,85	(132,90)	(425,92)	27,40	1,09
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(11,10)	11,49	32,31	10,43	(19,79)
6.a. Barang	(11,21)	11,58	31,81	9,50	(20,21)
6.b. Jasa	4,19	9,43	10,99	10,59	(7,30)
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	4,87	22,14	(6,88)	4,05	4,02
7.a. Barang	5,36	27,68	(14,52)	7,62	5,01
7.b. Jasa	(0,40)	13,39	15,48	13,07	4,99
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(7,35)	20,10	3,91	16,22	8,85
8.a. Ekspor	2,14	(16,10)	17,91	0,45	7,56
8.b. Impor	(5,50)	12,87	(4,46)	1,76	6,34
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,72	4,23	6,30	4,44	3,51

* Angka Sementara

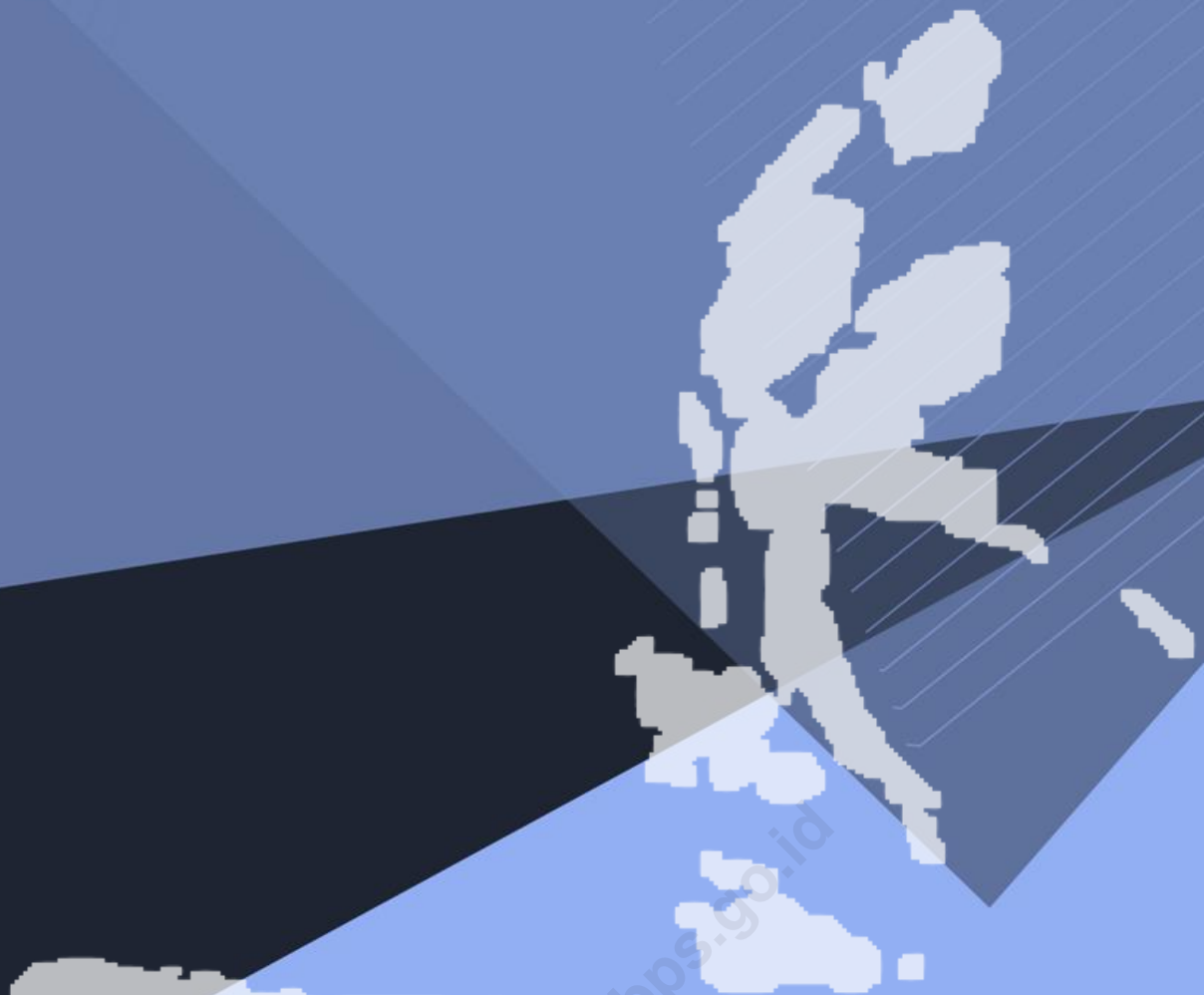
** Angka Sangat Sementara

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama *Asian Development Bank* dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**
Jalan Stadion No. 65 Ternate, Telp. (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email :
bps8200@bps.go.id

ISSN 2460-7487



9 770246 074875